

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada hakikatnya berkewajiban untuk memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum setiap Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialami oleh Penduduk yang berada di dalam dan/atau di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Sistem administrasi kependudukan merupakan sub sistem dari sistem administrasi Negara, yang mempunyai peranan penting dalam pemerintahan dan pembangunan. Penyelenggaraan administrasi kependudukan diarahkan pada pemenuhan hak asasi setiap orang dibidang pelayanan administrasi kependudukan, peningkatan kesadaran penduduk dan kewajibannya untuk berperan serta dalam pelaksanaan administrasi kependudukan. Sejalan dengan arah penyelenggaraan administrasi kependudukan, maka pendataan penduduk dan pencatatan sipil sebagai sub-sub sistem pilar dari administrasi kependudukan perlu ditata dengan sebaik-baiknya agar dapat memberikan manfaat dalam perbaikan pemerintahan dan pembangunan.

Perolehan data kependudukan di Indonesia masih tergantung pada data hasil sensus dan survei atau data administratif yang diperoleh secara periodik dan masih bersifat *agregat* (makro). Kebutuhan data mikro penduduk untuk identifikasi calon pemilih Pemilu, penyaluran dana Jaring Pengaman Sosial (JPS),

bantuan untuk penduduk miskin / BLT, beasiswa untuk wajib belajar dan kegiatan perencanaan pembangunan dirasakan masih belum akurat karena tidak diperoleh dengan cara registrasi.

Pencatatan biodata penduduk diarahkan pada pemenuhan kebutuhan mikro faktual dari setiap penduduk dan keluarga yang merupakan tanggung jawab pemerintah kabupaten/kota, dimana dalam pelaksanaannya diawali dari desa/kelurahan selaku ujung tombak pendataan penduduk. Data tersebut merupakan sumber *database* kependudukan secara nasional yang menjadi tanggung jawab Pemerintah Pusat, dalam hal ini Direktorat Jenderal Administrasi Kependudukan. Namun hingga saat ini hasil pendataan penduduk dan pencatatan sipil yang berupa data/laporan belum dapat secara maksimal didayagunakan untuk kepentingan pelayanan publik lainnya maupun untuk perencanaan pembangunan. Banyak komponen-komponen pendataan penduduk, seperti kelahiran, kematian, perkawinan, dan perceraian belum didata secara benar. Selain itu juga peristiwa kependudukan, seperti pindah datang, pindah keluar belum di tata secara baik, bahkan penduduk masih banyak yang belum memiliki dokumen seperti Kartu Tanda Penduduk (KTP), akta kelahiran, kartu keluarga bahkan selain itu ada permasalahan yang serius, yaitu adanya penduduk yang memiliki KTP ganda.

Untuk penerbitan NIK, setiap Penduduk wajib mencatatkan biodata Penduduk yang diawali dengan pengisian formulir biodata Penduduk di desa/kelurahan secara benar untuk selanjutnya di proses di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. NIK wajib dicantumkan dalam setiap Dokumen Kependudukan, baik dalam pelayanan Pendaftaran Penduduk maupun Pencatatan Sipil, serta sebagai dasar penerbitan berbagai dokumen yang ditetapkan

berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan. Dalam Pelaksanaannya, pada setiap proses pendataan yang berhubungan dengan administrasi kependudukan, baik petugas Desa maupun penduduk, masih terdapat kurangnya kesadaran akan pentingnya Nomor Induk Kependudukan (NIK) sebagai identitas pembeda (*unique*) antara satu dengan yang lainnya, sehingga komponen NIK tidak dimasukkan dalam setiap pendataan penduduk.

Dalam pelayanan pendataan penduduk perlu dilakukan dengan benar dan cepat agar penduduk sebagai pelanggan merasa mendapat pelayanan yang memuaskan. Pada pendataan biodata penduduk yang masuk ke kecamatan dan kabupaten memiliki permasalahan sulitnya mencari arsip /berkas data-data penduduk. Hal ini akan mengakibatkan terlambatnya mendata penduduk yang seharusnya sudah masuk ke kabupaten.

Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan faktor sentral dalam suatu institusi. Apapun bentuk dan tujuannya, institusi dibuat berdasarkan visi untuk kepentingan manusia dan dalam pelaksanaan misinya dikelola oleh manusia. Jadi manusia merupakan faktor strategis dalam semua kegiatan institusi. Seiring dengan perkembangan dan penyesuaian diri suatu institusi dalam hal ini pegawai negeri dengan perkembangan IPTEK dan perkembangan lingkungan, maka sumber daya manusia yang ada di dalamnya harus pula dikembangkan agar dapat pula menyesuaikan diri dengan perkembangan institusi terutama dalam bidang teknologi. Pengembangan sumber daya manusia perlu dilakukan terus menerus untuk menghindari sumber daya manusia yang kurang pengetahuannya, yang tidak siap dalam perubahan yang terjadi, terutama dalam bidang teknologi.

Kemajuan teknologi yang sangat pesat mendorong setiap instansi untuk mengikuti perkembangan teknologi dan terus meningkatkan kemampuannya dalam mengelola data-data dan informasi yang lebih akurat dan efisien yang dibutuhkan suatu instansi. Berdasarkan permasalahan tersebut, maka dibutuhkan suatu aplikasi atau perangkat lunak yang mendukung kebutuhan instansi pemerintahan desa yang akan sangat membantu manajemen instansi pemerintah baik dalam menciptakan efisiensi dan efektifitas kerja instansi pemerintah desa itu sendiri, maupun dalam meningkatkan pelayanan ke masyarakat.

Sehubungan dengan permasalahan yang telah dikemukakan diatas, maka akan dilakukan pembangunan perangkat lunak administrasi kependudukan dengan objek kasus di Desa Margaluyu Kecamatan Tanjungsari Kabupaten Sumedang dimana desa margaluyu memiliki misi dan visi untuk menyediakan dan memberikan pelayanan yang terbaik bagi penduduknya terutama dalam hal administrasi kependudukan, yang kemudian diangkat menjadi topik dalam pembuatan judul laporan Tugas Akhir dengan judul **”PEMBANGUNAN PERANGKAT LUNAK ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN (Studi Kasus: Desa Margaluyu)”**.

## **1.2 Identifikasi Masalah**

Berdasarkan masalah yang telah diuraikan di atas, maka penulis dapat mengidentifikasi permasalahan yang terjadi yaitu:

1. Bagaimana merancang dan membangun perangkat lunak pendataan penduduk agar data yang dihasilkan akurat dan mutakhir serta semua

proses pendataan penduduk dapat ter-*manage* dengan baik dan tidak adanya permasalahan pendataan penduduk?

2. Apa saja komponen-komponen pendataan penduduk yang harus dibenahi?
3. Bagaimana mengembangkan sumber daya manusia dalam sebuah instansi agar tidak tertinggal pengetahuannya dalam hal perkembangan IPTEK?

### 1.3 Batasan Masalah

Dalam pembangunan perangkat lunak ini, supaya pembahasan dan penganalisaan dapat dilakukan dan tercapai sesuai dengan tujuan, maka masalah yang akan dibahas akan dibatasi dan nantinya akan menjadi dasar batasan-batasan dalam pembangunan perangkat lunak. Batasan-batasan tersebut adalah:

1. Membenahi komponen-komponen data penduduk terutama memasukan Nomor Induk Kependudukan (NIK) menjadi komponen data penduduk yang digunakan sebagai pembeda (*unique*) antara penduduk yang satu dengan yang lainnya.
2. Perangkat lunak yang akan dibangun hanya dibatasi untuk *manage* proses-proses yang berhubungan dengan administrasi kependudukan, yaitu meliputi :
  - Data KK
  - Data Induk Penduduk
  - Data Kematian
  - Data Kelahiran
  - Data Pindah Datang

- Data Pindah Keluar
- Laporan Kependudukan
- Pembuatan surat keterangan kematian, kelahiran, dan pindah.

#### 1.4 Tujuan

Pembangunan perangkat lunak administrasi kependudukan yang diajukan sebagai Tugas Akhir ini adalah untuk memberikan solusi tentang berbagai masalah administrasi kependudukan di tingkat pemerintahan desa, khususnya Desa Margaluyu, terutama permasalahan pengelolaan data kependudukan, dan dokumentasi pendataan penduduk. Berikut sebagian tujuan-tujuan yang diharapkan tercapai dengan terbangunnya perangkat lunak ini:

1. Semua pendataan yang berhubungan dengan administrasi kependudukan dapat dilakukan secara optimal, akurat dan mutakhir.
2. Dapat menjamin tersimpannya data-data penduduk dan dapat digunakan untuk pembuatan laporan dalam bentuk dokumen fisik (*print out*) sesuai dengan data-data yang ada.
3. Dapat menjadi penunjang kemajuan pengetahuan aparat desa, terutama dalam hal perkembangan Teknologi.

Hasil akhir dari Tugas Akhir yaitu sebuah produk yang nantinya diharapkan dapat diimplementasikan sebagai penunjang kinerja petugas desa

dalam proses administrasi kependudukan di tingkat pemerintahan desa, khususnya di Desa Margaluyu.

## **1.5 Teknik Penelitian**

Untuk pengumpulan data dan informasi penunjang dalam pembangunan perangkat lunak dan penyusunan laporan tugas akhir ini, maka akan dilakukan beberapa metodologi-metodologi sebagai berikut:

### **1.5.1 Observasi**

#### **1.5.1.1 Wawancara**

Wawancara dilakukan dengan aparat desa, baik Kepala Desa maupun dengan pamong-pamong desa yang bekerja di kantor Desa. Dengan melakukan wawancara terhadap aparat desa akan mendapatkan gambaran tentang proses pendataan penduduk yang selama ini dilakukan di lingkungan Desa Margaluyu.

#### **1.5.1.2 Pengumpulan dokumen**

Pengumpulan dokumen bertujuan untuk mendapatkan dokumentasi berupa format pendataan yang dilakukan sebelumnya secara tertulis, profil desa margaluyu, dokumen batas wilayah dan yang lainnya.

### **1.5.2 Study Literature**

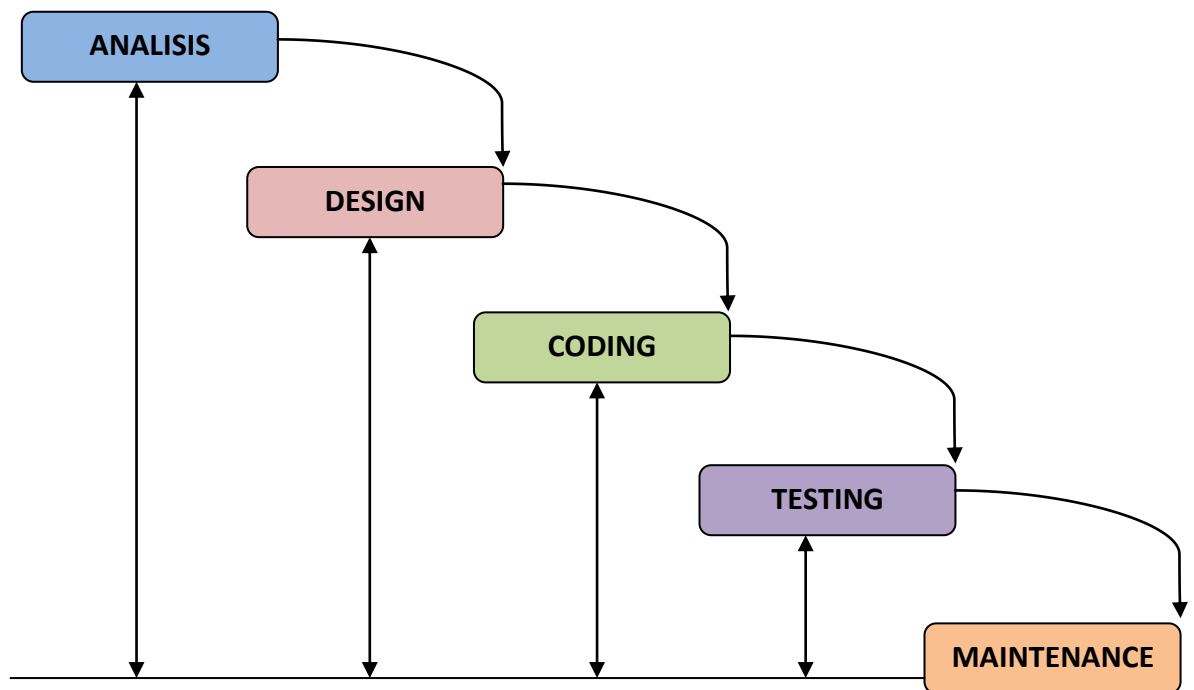
*Study literature* yang dilakukan dengan mencari dan membaca data yang bersumber dari *website* serta buku-buku yang berhubungan dengan pokok bahasan.

### 1.5.3 Konsultasi

Konsultasi dilakukan dengan dosen pembimbing untuk memberi pendapat, saran yang harus dilakukan dalam mengerjakan tugas akhir ini.

## 1.6 Metodologi Pengembangan Perangkat Lunak

Pembangunan perangkat lunak administrasi kependudukan ini akan dilakukan dengan metodologi *waterfall*. Metodologi ini memungkinkan untuk pengujian atau pengecekan pada setiap tahapan untuk meminimalisir kesalahan pada setiap tahapan. Jika terjadi kesalahan pada satu tahap maka kembali pada tahap sebelumnya untuk perbaikan, dan jika telah benar maka dilanjutkan pada tahapan selanjutnya.



Gambar 1.1 Metodologi *Waterfall*



### **1.6.1 Analisis (*Analysis*)**

Tahapan analisis dilakukan untuk mengetahui kebutuhan pengguna/*client* (*user requirement*) untuk dijadikan acuan kebutuhan perangkat lunak (*software request*), selanjutnya dilakukan perencanaan perangkat lunak yang akan dibangun (*software planning*) dan pendefinisian kebutuhan perangkat lunak (*software requirement definition*).

### **1.6.2 Perancangan (*Design*)**

Pada tahapan ini dilakukan perancangan perangkat lunak yang akan dibangun dan harus sesuai dengan analisis yang telah dilakukan termasuk juga perancangan Database

### **1.6.3 Pengkodean (*coding*)**

Pada tahapan ini dilakukan pengkodean (*coding*) dengan menggunakan bahasa pemrograman sesuai dengan perancangan yang dilakukan.

### **1.6.4 Pengujian (*Testing*)**

Setelah proses *coding* selesai maka dilakukan pengujian terhadap perangkat lunak yang telah dibangun, jika masih terjadi kesalahan atau tidak sesuai dengan tujuan awal maka dilakukan kembali perbaikan dan penyempurnaan untuk selanjutnya dilakukan pengujian kembali.

### 1.6.5 Perawatan (*Maintenance*)

Setelah perangkat lunak ini terbangun maka harus dilakukan perawatan (*maintenance*) terhadap perangkat lunak secara kontinuitas/terus-menerus.

## 1.7 Jadwal Penelitian dan Penyusunan Laporan

Tabel 1.1 Jadwal Penelitian dan Penyusunan Laporan

Tahap Pengerjaan	BULAN				
	Oktober	November	Desember	januari	februari
<i>System request</i>					
<i>System planning</i>					
<i>Software req. definition</i>					
<i>Software design</i>					
<i>Coding</i>					
<i>Testing</i>					
<i>Documentation</i>					

## **1.8 Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan laporan Tugas Akhir ini sebagai berikut:

### **BAB I PENDAHULUAN**

Bab ini menguraikan latar belakang masalah, tujuan pembangunan perangkat lunak, perumusan masalah yang merumuskan berbagai masalah yang berhubungan dengan objek penelitian, batasan masalah untuk memberikan batasan tentang masalah yang akan dibahas, metodologi pembangunan perangkat lunak yang digunakan, metodologi yang dilakukan dalam mengerjakan tugas akhir ini, serta sistematika penulisan yang menguraikan urutan penyajian yang digunakan dalam penyusunan laporan tugas akhir.

### **BAB II LANDASAN TEORI**

Bab ini membahas tentang landasan teori dari topik laporan tugas akhir secara mendalam.

### **BAB III ANALISIS**

Bab ini akan menguraikan hasil pengolahan data dan analisis terhadap sistem pendataan penduduk serta persoalan yang ada pada sistem pendataan penduduk tersebut.

### **BAB IV PERANCANGAN**

Bab ini menguraikan tahapan-tahapan perancangan sistem yang akan dibangun sesuai dengan hasil analisis yang telah dilakukan.

## BAB V IMPLEMENTASI

Bab ini berisi pengimplementasian sesuai dengan analisis dan perancangan yang telah dilakukan sebelumnya.

## BAB VI PENUTUP

Bab ini berisi seluruh kesimpulan akhir serta usulan, solusi dan saran, baik diajukan kepada instansi maupun peneliti lebih lanjut.